

Judul : Selain SPPG, kantin sekolah diusulkan bisa ikut kelola MBG
Tanggal : Senin, 20 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Selain SPPG, Kantin Sekolah Diusulkan Bisa Ikut Kelola MBG

Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai pro dan kontra. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk menjangkau sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru di tengah belum tuntasnya evaluasi tata kelola program MBG. Wacana ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan keleluasaan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji alternatif pelaksanaan MBG yang

selama ini hanya dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengatakan, salah satu alternatif yang dapat dikaji ialah melibatkan kantin sekolah dalam penyediaan makanan bagi para siswa. Namun, dia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. "Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, 'Silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh,'

Jadi, jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya," kata Agustina di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Namun, Prabowo meminta setiap alternatif kebijakan tidak dipusatkan secara terburu-buru. BGN diminta lebih dahulu menyusun kajian mendalam mengenai dasar, manfaat, risiko, dan tata kelola dari setiap pilihan. "Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan dikaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya," ujar Agustina. Wakil Ketua Komisi IX DPR dari

Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini menyambut baik, jika kantin sekolah dilibatkan dalam mengelola program MBG. Dia menilai biaya operasional relatif lebih murah jika MBG dikelola oleh pihak sekolah. "Perlu dilakukan pemetaan sekolah-sekolah yang mampu mengelola MBG. Karena tidak semua sekolah punya lahan dan ruangan yang cukup untuk membuat dapur. Bagi sekolah yang mampu dipersilakan, dan bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan," kata Yahya, Jumat (17/7/2026). Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem Irma

Suryani Chaniago tidak setuju dengan wacana pelibatan kantin sekolah untuk menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menegaskan, jangan lagi ditambah dengan sekolah-sekolah membuat dapur baru. "Dapur baru itu enggak perlu ya. Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh ya, jangan bikin masalah baru lah," ujar Irma dalam rapat Komisi IX DPR di Jakarta, Jumat (17/7/2026). Untuk mengetahui pandangan Yahya Zaini dan Irma Suryani Chaniago terkait opsi kantin sekolah ikut mengelola MBG, berikut wawancaranya.

YAHYA ZAINI,

Wakil Ketua Komisi IX DPR/Fraksi Partai Golkar

Biaya Operasional Relatif Lebih Murah



“Pelibatan sekolah akan meningkatkan partisipasi sekolah dari orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas serta keamanan makanan.”

Apa tanggapan Anda terkait wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Saya menyambut baik gagasan atau rencana pelibatan sekolah dalam mengelola MBG ke depan. Kedua, perlu dilakukan pemetaan sekolah-sekolah yang mampu mengelola MBG karena tidak semua sekolah memiliki lahan dan ruangan yang cukup untuk membuat dapur. Kami pun menyambut baik rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan refocusing dan efisiensi anggaran karena anggaran BGN selama ini dinilai belum efisien. Namun, kebijakan tersebut hanya bisa diterapkan di sekolah swasta.

Karena seperti itu?
Sebab, sekolah swasta umumnya memiliki siswa yang berasal dari

golongan mampu. Sementara itu, di sekolah negeri komposisi siswanya bercampur antara yang mampu dan kurang mampu sehingga kebijakan tersebut sulit diterapkan.

Apa lagi saran Anda kepada BGN?
Saya meminta BGN melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah negeri.

Menurut Anda, apa yang perlu dikaji lebih dalam untuk menerapkan wacana ini?

Perlu dikaji mengenai skema pembiayaan dapur yang dikelola sekolah. Apakah skemanya sama dengan yang dikelola yayasan atau tidak. Pelibatan sekolah akan meningkatkan parti-

sipasi sekolah dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas serta keamanan makanan.

Bagaimana dengan penerimanya?
Nah, mengenai rencana membatasi penerima manfaat dari desil 8-10 harus diterapkan secara hati-hati. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan sekolah. Bagaimana mungkin dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG, sementara siswa lainnya tidak menerima MBG.

Jika terjadi refocusing anggaran, siapa penerima yang bisa dikurangi?

Jika BGN ingin melakukan refocusing, yang perlu dipertimbangkan untuk tidak lagi menerima MBG adalah siswa SMA karena masa pertumbuhannya sudah tidak terlalu dipengaruhi oleh tambahan asupan gizi. ■ **YUFI**

IRMA SURYANI CHANIAGO,

Anggota Komisi IX DPR/Fraksi Partai NasDem

Bisa Menimbulkan Masalah Baru



“BGN harus terlebih dahulu mengevaluasi seluruh dapur MBG yang bermasalah. Evaluasi dilakukan dari sisi fiskal, administrasi, dan sumber daya manusia (SDM).”

Bagaimana Anda melihat wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Menurut BGN, itu hanya arahan Presiden untuk melakukan pengkajian. Menurut saya, untuk sekolah yang memiliki kantin yang baik dan ingin mengoperasikannya juga tidak apa-apa, asalkan dikelola secara profesional dan memenuhi ketentuan laik higienis.

Apa tidak menimbulkan masalah baru?

Program MBG ini merupakan program Pemerintah yang sebelumnya joint operation dengan masyarakat. Pemerintah memiliki program, sementara masyarakat menyediakan dapur beserta seluruh peralatannya. Program ini sangat baik karena

mengikutsertakan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Harus menjadi *win-win solution*. Namun, lebih baik BGN mengevaluasi tata kelola MBG terlebih dahulu.

Jadi menurut Anda wacana ini belum bisa dilakukan?

Satu persoalan lama saja belum selesai, yaitu soal dapur yang sudah mendapat *approval* dari BGN dan sudah dibangun 100 persen, tetapi masih menjadi masalah karena belum dioperasikan. Jika tidak dioperasikan oleh BGN, Pemerintah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Apa saja yang perlu dievaluasi oleh BGN dalam program MBG ini?
BGN harus terlebih dahulu menge-

valuasi seluruh dapur MBG yang bermasalah. Evaluasi dilakukan dari sisi fiskal, administrasi, dan sumber daya manusia (SDM). Semua itu harus dilakukan secara paralel. Tidak bisa hanya menyelesaikan tata kelola, sementara solusi atas berbagai persoalan yang ada saat ini tidak kunjung diselesaikan.

Selain itu?
Pencapaian dapur fiktif, dapur yang diduga terafiliasi dengan praktik jual-titik, hingga dapur yang tidak memenuhi standar juga harus diselesaikan. Setelah itu, baru dilakukan verifikasi terhadap dapur-dapur baru yang sudah mendapat *approval* dan siap beroperasi 100 persen. Terutama, dapur tersebut harus sudah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). ■ **YUFI**